



Identifikasi Jebakan Kerentanan Miskin Transien di Sumuraram Magelang

Yuni Indarti,^{1*} Drajat Tri Kartono,¹ Haryani Saptaningtyas¹

¹Magister Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: yuniindarti@student.uns.ac.id, drajattri@staff.uns.ac.id, h.saptaningtyas@staff.uns.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 05-11-2025, Revised: 23-11-2025, Accepted: 24-11-2025, Published: 02-12-2025

Abstrak

Masalah kemiskinan ekstrem telah menjadi isu strategis global, namun ironisnya, kelompok rumah tangga miskin transien seringkali terabaikan dalam skema kebijakan pengentasan kemiskinan. Kelompok ini, meskipun memiliki motivasi untuk keluar dari kemiskinan, sangat rentan jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan saat terjadi guncangan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui gambaran keadaan rumah tangga miskin transien di Desa Sumuraram, Kabupaten Magelang, dan (2) mengidentifikasi masalah-masalah penyebab kemiskinan transien secara partisipatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis Participatory Action Research (PAR). Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion yang melibatkan rumah tangga miskin transien dan perangkat desa. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Rumah tangga miskin transien di Desa Sumuraram berada dalam jebakan kerentanan (*vulnerability trap*), dengan ciri: a) Kesejahteraan marginal, di mana rumah tangga berada di atas garis kemiskinan tetapi bergantung pada upah buruh harian fluktuatif dan minimnya aset fisik layak. b) Kerentanan tinggi, di mana terekspos risiko guncangan (kesehatan, sosial, kegagalan program) tanpa proteksi memadai, bahkan lebih rentan daripada miskin ekstrem yang masih mendapat bantuan sosial. c) Ketidakberdayaan sistemik, ditandai dengan kurangnya akses dan suara akibat kegagalan sistem pendataan dan ketidakadilan akses program di tingkat desa. 2) Masalah penyebab kemiskinan transien antara lain: a) Keterbatasan sumber daya manusia (pendidikan rendah dan pekerjaan informal), b) Ketidaktepatan desain intervensi (bansos yang hanya memberi rasa aman, bukan peningkatan kesejahteraan), dan c) Inefisiensi kelembagaan desa (asimetri informasi dan kekosongan program pemberdayaan spesifik).

Kata Kunci:
jebakan kerentanan; miskin transien; pemberdayaan

Abstract

The issue of extreme poverty has become a global strategic issue, but ironically, transient poor households are often neglected in poverty alleviation policy schemes. This group, despite their motivation to escape poverty, is highly vulnerable to falling back below the poverty line when shocks occur. This study aims to (1) describe the conditions of transient poor households in Sumuraram Village, Magelang Regency, and (2) identify the causes of transient poverty through a participatory approach. This study uses a qualitative approach with Participatory Action Research (PAR). Data were collected through field observations, in-depth interviews, and Focus Group Discussions involving transient poor households and village officials. Data analysis was conducted qualitatively through reduction, data

presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that: 1) Transient poor households in Sumuraram Village are in a vulnerability trap, with the following characteristics: a) Marginal welfare, where households are above the poverty line but depend on fluctuating daily wages and have minimal physical assets. b) High vulnerability, where they are exposed to shocks (health, social, program failure) without adequate protection, even more vulnerable than the extremely poor who still receive social assistance. c) Systemic powerlessness, characterized by a lack of access and voice due to the failure of data collection systems and unfair access to programs at the village level. 2) Issues causing transient poverty include: a) Limited human resources (low education and informal employment), b) Inappropriate intervention design (social assistance that only provides a sense of security, not improved welfare), and c) Village institutional inefficiency (information asymmetry and lack of specific empowerment programs).

Keywords:

empowerment; transient poverty; vulnerability trap



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Isu pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan bagian fundamental dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Hampir setiap negara termasuk Indonesia telah mengalokasikan sumber daya besar untuk mencapai target tersebut. Struktur kemiskinan secara umum dikelompokkan menjadi dua kategori besar yaitu miskin kronis (*chronic poverty*) dan miskin transien (*transient poverty*). Miskin kronis berada jauh di bawah garis kemiskinan untuk waktu yang lama. Sementara miskin transien adalah kelompok yang berfluktiasi di sekitar garis kemiskinan, di mana miskin di satu periode tetapi mungkin mampu mandiri di periode lain dan sangat rentan jatuh miskin kembali akibat guncangan ekonomi atau krisis (Santoso, 2018). Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), kelompok miskin transien sering diidentifikasi setara dengan kategori "hampir miskin" atau Desil 3 dan Desil 4 dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Fokus dominan kebijakan publik cenderung terpusat pada kemiskinan ekstrem atau kronis, terutama hingga tahun 2015. Hal ini berimplikasi pada diabaikannya perumusan skema kebijakan khusus yang secara eksplisit ditujukan untuk mengatasi masalah miskin transien. Berbagai penelitian terdahulu mengkonfirmasi adanya kekosongan ini, serta menyimpulkan bahwa masalah dan keberadaan miskin transien telah terabaikan dalam skema besar kebijakan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat nasional maupun daerah (Santoso, 2018; Wardana & Sari, 2020). Padahal dari perspektif sosiologis pembangunan, kelompok miskin transien memiliki karakteristik yang berbeda, diantaranya memiliki motivasi dan kapasitas yang lebih besar untuk berusaha lepas dari kemiskinan, namun sangat membutuhkan intervensi pemberdayaan yang tepat untuk meningkatkan ketahanan atau resilience (Filho, 2022). Menurut Chambers (2007), kegagalan dalam merumuskan kebijakan yang berbeda untuk miskin transien dan miskin kronis dapat mengakibatkan inefisiensi dan ketidaktepatan sasaran program.

Miskin transien berada dalam kondisi yang disebut jebakan kerentanan (*vulnerability trap*), di mana saat ini tidak miskin tetapi diprediksi akan jatuh di bawah garis kemiskinan di masa depan (Chambers dalam Gascon & McIntyre-Mills, 2018). Kerentanan ini timbul karena paparan terhadap guncangan negatif seperti

kehilangan pekerjaan, inflasi, sakit, dan kegagalan program yang dapat menguras aset minimal dan membuat kembali terperosok ke dalam kemiskinan kronis. Ciri-ciri utama masyarakat miskin transien meliputi pendapatan tidak stabil (sering buruh harian), keterbatasan aset fisik (rumah yang tidak layak), kesehatan yang rentan, dan keterbatasan akses ke pendidikan dan perlindungan sosial formal (Standing, 2011). Kondisi ini menuntut pendekatan intervensi yang bersifat tindakan pencegahan sebelum guncangan terjadi, yaitu fokus pada penguatan aset, diversifikasi pendapatan, dan pembangunan jaring pengaman.

Temuan empiris menunjukkan adanya fluktuasi cepat jumlah masyarakat miskin dari tahun 2021-2023 sebagaimana dijelaskan pada data tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. DTKS Desa Sumurarum Tahun 2021-2023

Kategori	2021		2022		2023	
	Rumah Tangga	Individu	Rumah Tangga	Individu	Rumah Tangga	Individu
Miskin Ekstrem	195	936	440	1735	167	954
Sudah Verifikasi dan Validasi			368	1305	124	500
Belum verifikasi dan validasi			72	430	43	454

Sumber: Data Sekunder Desa Sumurarum, 2024

Fluktuasi jumlah masyarakat miskin ini diakibatkan oleh bencana non-alam seperti pandemi Covid-19. Perubahan status kesejahteraan yang dinamis tersebut merefleksikan karakteristik kemiskinan transien. Lebih lanjut, desa seringkali menjadi garda terdepan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan, namun juga menjadi titik di mana asimetri informasi dan ineffisiensi kelembagaan sering terjadi. Program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa seringkali masih menggunakan pendekatan yang belum adaptif, tidak membedakan antara miskin kronis dan transien. Pendekatan intervensi yang dominan *top-down* juga membuat masyarakat seringkali menganggap program pemerintah sebagai *given* (pemberian) yang diterima apa adanya, bukan sebagai proses partisipatif untuk kemandirian.

Maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi riil kelompok miskin transien di tingkat rumah tangga yang menghalangi untuk keluar dari jebakan kerentanan. Melalui pendekatan *Participatory Action Research*, penelitian ini berupaya memberikan basis data yang kuat untuk perumusan model pemberdayaan yang *bottom-up* dan tepat sasaran sesuai kebutuhan kelompok miskin transien. Sehingga fokus artikel ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui gambaran keadaan rumah tangga miskin transien di Desa Sumurarum, dan 2) Mengidentifikasi masalah-masalah penyebab kemiskinan transien di Desa Sumurarum secara partisipatif.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, di mana peneliti meneliti kondisi objek yang alamiah dan menjadi instrumen kunci, dengan penekanan pada penggalian makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019). Pendekatan yang diadopsi adalah *Participatory Action Research* (PAR), karena memiliki relevansi dengan tujuan pemberdayaan yaitu melibatkan partisipasi penuh masyarakat miskin khususnya pada level rumah tangga, mulai dari tahap awal identifikasi masalah hingga potensi evaluasi kegiatan pemberdayaan (Stringer, 2007). Pendekatan ini selaras dengan

falsafah pemberdayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help them-selves*).

Lokasi penelitian adalah Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Lokasi ini dipilih karena mencerminkan dinamika tinggi dalam perubahan status kemiskinan yang ditandai dengan fluktuasi cepat jumlah masyarakat miskin sehingga mengindikasikan konsentrasi kelompok miskin transien. Subjek penelitian meliputi: 1) Rumah tangga miskin transien, sebagai subjek utama yang mengalami dan memahami langsung kondisi kerentanan dan ketidakberdayaan, dan 2) Perangkat Desa Sumurarum, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasie Pemerintahan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Kesejahteraan yang bertanggung jawab atas pendataan, implementasi program, dan alokasi anggaran kemiskinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan mengadopsi prinsip-prinsip PAR, antara lain observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif, melalui tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Keadaan Rumah Tangga Miskin Transien di Desa Sumurarum

Temuan di Desa Sumurarum secara jelas memetakan kelompok miskin transien sebagai rumah tangga yang berada dalam kondisi rentan dan tidak berdaya (*vulnerable and powerless*). Meskipun secara nominal berada di atas garis kemiskinan (Desil 3 dan Desil 4), kondisi kesejahteraan kelompok miskin transien sangat marginal sehingga menciptakan *vulnerability trap* yaitu sebuah kondisi dinamis dan rentan jatuh kembali ke kemiskinan. Analisis sosiologis menurut Tjokrowinoto dalam (Sulistiyani, 2017) membagi kondisi miskin transien ini ke dalam tiga dimensi utama: Kesejahteraan (*Welfare*), Kerentanan (*Vulnerability*), dan Ketidakberdayaan (*Powerlessness*).

a. Kesejahteraan (*Welfare*)

Kesejahteraan mencakup kondisi material yang direfleksikan melalui kepemilikan aset, stabilitas pendapatan, dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar. Kelompok miskin transien menurut definisi desil 3 dan desil 4 telah menunjukkan peningkatan kecil dalam dimensi ini dibandingkan miskin ekstrem. Namun, temuan di Desa Sumurarum mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan pada informan miskin transien (RT.H dan RT.D) bersifat marginal dan tidak mandiri. RT.H secara eksplisit menyatakan pekerjaannya sebagai buruh harian yang menunjukkan ketidakstabilan pendapatan, "Ya buruh, buruh mbak. Wong kadang oleh kadang mboten kan nggih buruh." Ketidakpastian harian tersebut bertentangan dengan kebutuhan stabilitas yang diperlukan untuk keluar dari garis kemiskinan (Adawiyah, 2020).

Kualitas aset fisik yang juga dijadikan sebagai indikator kemiskinan, kondisi pada RT.H cenderung masih di bawah standar optimal atau masuk indikator kemiskinan. "Saya itu gendenge asbes. Belum mbak, masih kayak Pak Tik gini, masih gendenge asbes. Pak Tik aja udah plafon, saya belum plafon". Pernyataan ini menunjukkan bahwa rumah tempat tinggal belum sepenuhnya permanen dan layak. Aset yang buruk tersebut tidak hanya memengaruhi kenyamanan, tetapi juga menjadi sumber

kerentanan terhadap bencana dan kondisi lingkungan yang pada gilirannya dapat menggerus sisa tabungan dan aset yang dimiliki.

Selain itu, perbaikan kesejahteraan yang terjadi sebagian besar merupakan hasil intervensi eksternal keluarga, bukan dari peningkatan kapasitas ekonomi internal rumah tangga. RT.H: "*Lha yang bagusin kan anak yang nomer akhir... Sing mbangun adine... Karena istri saya setiap bulan yo selalu membantu, wong tuo diutamakke.*" Hal tersebut menyoroti ketergantungan ekonomi rumah tangga inti. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada transfer remiten dari anak seringkali menjadi penyangga sementara, bukan solusi struktural untuk kemiskinan, terutama di daerah pedesaan (Syata, 2024).

Sedangkan perbandingan dengan rumah tangga lain yang secara visual memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi seperti rumah bertingkat namun menerima bantuan, menimbulkan isu ketidakadilan persepsi. RT.D: "*Wong sing omah tingkat iki malah dikei beras.*" Meskipun rumah tangga miskin transien mungkin memiliki aset sedikit lebih baik daripada miskin ekstrem, namun tetap merasa kesejahteraannya tidak diakui, terutama ketika program bantuan tidak diterima. Hal tersebut memicu rasa ketidakpuasan dan memperlambat dorongan untuk berinvestasi dalam peningkatan kesejahteraan yang lebih substansial.

Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan pada kelompok transien ini hanyalah pengentasan semu. Fluktuasi pendapatan harian, aset perumahan yang masih rentan, dan ketergantungan pada transfer keluarga menunjukkan bahwa dimensi kesejahteraannya masih berada dalam batas kritis, siap runtuh kembali ke kategori miskin ekstrem saat terjadi guncangan.

b. Kerentanan (*Vulnerability*)

Kerentanan mengacu pada ketidakmampuan rumah tangga dalam mengantisipasi, mengelola, dan memulihkan diri dari guncangan (risiko) yang dapat menurunkan status ekonomi. Kerentanan pada rumah tangga miskin transien di Desa Sumurarum diidentifikasi sebagai isu mendesak dan menjadi penghubung utama dengan *deprivation trap*. Guncangan yang dialami bersifat eksternal dan internal. Guncangan eksternal terbesar adalah penghapusan bantuan sosial (bansos) akibat perubahan kebijakan dan pemutakhiran data. RT D: "*Aku ke basan PKHku dihapus, aku ora oleh kabeh saiki, blas ra oleh... Ning waktu itu memang pengurangan kathah.*" Penghapusan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya secara tiba-tiba menghilangkan jaring pengaman sosial. Penelitian Ariansyah et al., (2025) menegaskan bahwa bansos menjadi instrumen kritis dalam menjaga rumah tangga rentan agar tidak jatuh ke kemiskinan, sehingga penghentian mendadak tanpa disertai pengganti yang memadai akan meningkatkan *vulnerability* secara drastis.

Selain guncangan eksternal berupa kebijakan, RT.H menghadapi guncangan internal dan struktural berupa keterbatasan fisik dan kesehatan. "*Kalo ibu itu kan cacat to mbak, sini, karena kecelakaan, patah ini, dah cacat. Tidak bisa bekerja, dua-duanya*". Hal tersebut mengindikasikan adanya beban *caring* dan biaya kesehatan yang tinggi, yang secara langsung menggerus pendapatan harian yang sudah tidak stabil. Beban penyakit dan disabilitas dalam rumah tangga adalah pendorong utama kemiskinan, karena menurunkan kapasitas kerja dan meningkatkan pengeluaran, sehingga menciptakan lingkar setan kerentanan.

Kerentanan juga diperparah oleh kegagalan intervensi program peningkatan kapasitas. RT H mengeluhkan belum pernah mengikuti pelatihan, sementara RT D

mengalami kegagalan program kelompok tani. RT.H: "*Belum, belum mbak. Belum pernah ikut pelatihan pelatihan itu belum*". RT.D: "*Bibit kopi kabeh do mati mbak, ora enek sing urip, kabeh. Sing oleh ora ono sing urip kabeh*". Program pemberdayaan yang macet atau bibit yang gagal merupakan risiko kegagalan investasi bagi rumah tangga transien. Hal tersebut tidak hanya membuang waktu dan modal sosial, tetapi juga menimbulkan keputusasaan yang menghalangi partisipasi di masa depan (Djazuli, 2024).

Dengan demikian, meskipun secara nominal berada di atas garis kemiskinan, rumah tangga miskin transien di Desa Sumuraram memiliki tingkat *vulnerability* yang lebih tinggi daripada rumah tangga miskin ekstrem yang masih mendapat bantuan sosial. Rumah tangga miskin transien adalah kelompok yang terekspos risiko tanpa proteksi yang memadai. Kerentanan ini menjadi faktor penentu kembalinya ke *deprivation trap* karena satu guncangan saja cukup untuk menghapus semua perbaikan kesejahteraan yang telah dicapai (Iswanto et al., 2021).

c. Ketidakberdayaan (*Powerlessness*)

Ketidakberdayaan merujuk pada kurangnya kontrol, suara, dan kemampuan rumah tangga untuk mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupannya, termasuk akses yang adil terhadap sumber daya publik dan informasi. Dimensi ini menjadi kunci yang mengunci rumah tangga miskin transien dalam *deprivation trap*, karena menghalangi upayanya untuk mengkompensasi kerentanan dan meningkatkan kesejahteraan.

Isu sentral ketidakberdayaan adalah kegagalan sistem pendataan dan ketidakadilan akses program. RT.H secara langsung menyatakan ketidakberdayaan ini dengan pengalamannya: "*Saya belum pernah didata... Mertua saya sudah ndak dapat... Sing wong nduwe mawon malah oleh. Kan modele rata rata jadi kaya gini, 'sopo cedak aku, ya ayo'. Nggak merata gitu lho.*" Pernyataan ini menunjukkan adanya bias dalam penyaluran bantuan yang diduga melibatkan kedekatan sosial atau kapital sosial yang tidak merata yang mengalahkan kriteria kemiskinan secara formal.

Ketidakberdayaan diperparah oleh kurangnya akses informasi dan transparansi keputusan. RT.H mengeluhkan kehilangan kesempatan karena tidak ada di rumah saat pendataan atau penyerahan bantuan. "*Nggak diambil karena saya kan ada tamu, saya ngelayanin... Wong saya posisi nggak dirumah, gitu*". Sementara RT.D membungkung mengenai modal usaha bagi yang mengundurkan diri dari PKH, "...aku kok dewe ora oleh yo mas? Wong malah diundurake kok ora oleh modal aku ngono kui lho."

Enomena ketidakberdayaan juga tampak dalam kegagalan bersuara atau mekanisme memberikan feedback. Meskipun RT.H menyuarakan perlunya pengalihan bantuan dari yang mampu ke yang membutuhkan, namun keluhan tersebut tampaknya tidak ditanggapi oleh sistem formal. Kurangnya saluran formal yang efektif bagi kelompok transien untuk memprotes diskriminasi atau ketidakakuratan data dapat memperkuat ketidakberdayaannya, sehingga terpaksa hanya menerima keputusan sepihak dari aparatur desa. "*Tolong sing bener mampu ki mbok di-stop, alihkan alihkan yang bener bener membutuhkan*".

Meskipun miskin secara ekonomi dan politik, RT.H menunjukkan modal sosial dan kapasitas organisasi yang tinggi. "*Saya tim inti tim inti PKJ Persatuan Komunikasi Jogja... saya juga pengurus*". Namun, kapasitas ini tidak dapat dikonversi menjadi akses terhadap bantuan di tingkat desa sendiri. Hal ini menunjukkan adanya

disconnect antara modal sosial dalam jaringan horizontal (antar relawan) dengan jaringan vertikal (dengan aparatur pemerintah desa), yang seharusnya menjadi kunci untuk mengatasi ketidakberdayaan (Fukuyama, 2002).

Secara ringkas, ketidakberdayaan pada rumah tangga miskin transien adalah hambatan kelembagaan yang sulit ditembus. Ketidakmampuan untuk memengaruhi akurasi data dan penyaluran bantuan, ditambah dengan bias akses berbasis kedekatan membuat rumah tangga tersebut teralienasi dari jaring pengaman sosial. Menurut Widiastuti et al., (2021) selama dimensi ketidakberdayaan tidak diatasi melalui reformasi tata kelola data dan transparansi penyaluran bantuan, peningkatan kesejahteraan dan penurunan kerentanan pada kelompok miskin transien akan selalu bersifat sementara.

Masalah Penyebab Kemiskinan Transien di Desa Sumurarum

Identifikasi masalah yang dilakukan secara partisipatif dilakukan dengan dua cara yaitu; brainstorming bersama masyarakat dihadiri 11 orang yang terdiri dari 10 orang kategori miskin transien dan 1 orang agen pembaharu dalam hal ini kader posyandu. Lalu dilakukan FGD dengan Pemerintah Desa dihadiri 12 perangkat desa terdiri atas 8 kadus, 2 kepala seksi, 1 kepala urusan keuangan dan sekretaris desa.

Dari dua kegiatan partisipatif ini diketahui bahwa masalah penyebab kemiskinan transien dijelaskan pada 3 aspek utama yang dijelaskan di bawah ini.

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Permasalahan utama masyarakat miskin transien berpusat pada keterbatasan SDM, terutama dominasi pendidikan rendah dan pekerjaan informal. Dilihat dari tingkat pendidikannya, peserta Brainstorming dari unsur rumah tangga miskin transien, masih didominasi oleh tingkat pendidikan rendah dan pekerjaan yang masuk kategori informal, terutama buruh harian lepas. Hal tersebut mencerminkan karakteristik umum masyarakat di wilayah pedesaan, khususnya di segmen rumah tangga miskin atau rentan. Sejalan dengan Khosla et al. (2023), salah satu determinan kemiskinan transien adalah keterbatasan akses ke pendidikan formal. Keterbatasan pendidikan tersebut dahulunya disebabkan oleh jarak tempuh yang signifikan antara lokasi dusun tempat tinggal dengan fasilitas pendidikan.

Secara sosiologis, tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor struktural yang membatasi peluang mobilitas sosial dan ekonomi sehingga membuat rumah tangga terperangkap dalam lingkaran pekerjaan yang tidak stabil dan rentan. Peserta rumah tangga miskin transien bergantung pada upah harian atau upah borongan yang cenderung tidak stabil dan fluktuatif. Kondisi ketidakpastian kerja mencerminkan karakteristik prekariat, sebuah kelompok sosial baru yang didefinisikan oleh pekerjaan yang tidak pasti, pendapatan tidak teratur, kurangnya jaminan kerja, dan jaring pengaman sosial (Standing, 2011).

Ketergantungan pada sektor informal membuat rumah tangga miskin transien rentan terhadap guncangan ekonomi. Ketidakpastian pendapatan menjadi lebih berat ketika terdapat beban tanggungan keluarga yang signifikan. Sebagai contoh, kasus RT.P menunjukkan beban ganda dalam menopang anak dan cucu setelah ditinggal suami. Ketidakpastian pendapatan semacam ini menghambat kemampuan rumah tangga untuk menabung, berinvestasi, atau mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tinggi (Devereux, 2001). Kasus RT.P juga menyoroti bagaimana rendahnya kapasitas SDM dan keterbatasan akses terhadap informasi

layanan publik (seperti pengurusan BPJS dan KIS), sehingga menjadikan rumah tangga sangat bergantung pada pinjaman informal untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya melahirkan tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan status pekerjaan berujung pada kerentanan akses sosial dan memperkuat perangkap ketidakberdayaan. Faktor ketidakberdayaan mendorong lemahnya fisik karena seluruh waktu dan tenaga digunakan untuk memenuhi kewajiban kerja harian. Selain itu, orang yang tidak berdaya menjadi lebih rentan terhadap tuntutan membayar utang, ancaman hukuman atau denda, serta penyalahgunaan wewenang yang merugikan diri sendiri (Gascon & McIntyre-Mills, 2018).

b. Ketidaktepatan Desain Intervensi Program

Berdasarkan hasil FGD, intervensi bantuan sosial dianggap tidak tepat sasaran dalam konteks miskin transien, di mana bantuan sosial hanya memberikan rasa aman dan bukan untuk peningkatan kesejahteraan. Bantuan sosial adalah jaring pengaman (Prihatin, 2024) yang berfungsi mengurangi penderitaan (miskin kronis). Namun, bagi miskin transien yang memiliki potensi untuk mandiri, bansos justru dapat menimbulkan ketergantungan, menghalangi untuk menolong dirinya sendiri.

Seperti yang ditunjukkan dalam temuan kegagalan bibit/ternak, menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan seringkali tidak didukung oleh pendampingan yang memadai atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Meskipun lebih dari separuh peserta Brainstroming (55%) mengaku menerima pendampingan, proporsi signifikan yang tidak menerimanya pendampingan mengindikasikan adanya kesenjangan dalam cakupan layanan pemberdayaan. Keterangan dari salah satu agen perubahan, mengungkapkan bahwa pendampingan yang diperoleh umumnya berupa pengarahan dan pertemuan rutin tiga bulanan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bentuk pendampingan yang dominan cenderung bersifat koordinatif dan informatif daripada berupa bimbingan teknis atau pengembangan keterampilan yang intensif dan berkelanjutan. Pertemuan rutin lebih berorientasi pada pemantauan dan penyampaian informasi program, daripada upaya proaktif yang bertujuan untuk membangun kapasitas ekonomi penerima secara substansial.

Pendampingan yang efektif dalam pemberdayaan bukan hanya sekadar transfer pengetahuan atau dana. Namun melibatkan proses fasilitasi yang membantu individu dan kelompok untuk mengidentifikasi masalah, membangun keterampilan, mengakses sumber daya, dan meningkatkan kontrol atas kehidupan (Freire, 1970). Apabila pendampingan yang diberikan tidak disertai dengan substansi yang relevan atau tidak berkelanjutan, seperti kasus bantuan bibit kopi dan bibit lele maka potensi program untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang akan terhambat. Kedua program tersebut mengindikasikan bahwa pemberdayaan yang dilakukan belum sesuai dengan kebutuhan riil (*real-needs*) masyarakat, melainkan lebih didasarkan pada kebutuhan yang dirasakan (*felt-needs*) oleh pelaksana program (Sumardjo, 2023). Ketidaksesuaian ini menyebabkan sulit terwujudnya tujuan pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian masyarakat (*community self-reliance*) (Alfitri, 2011). Desain program yang tidak partisipatif atau *top-down* berisiko menghasilkan program yang tidak berkelanjutan, yang pada akhirnya menambah beban kerentanan bagi rumah tangga transien.

c. Inefisiensi Kelembagaan Desa

Pemetaan kelembagaan hasil FGD menunjukkan bahwa kelembagaan seperti perangkat desa belum berfungsi secara optimal dalam menjembatani kebutuhan informasi dan akses antara pemerintah dan kelompok miskin transien. Asimetri informasi ini diperburuk oleh sistem pendataan yang belum adaptif terhadap dinamika status kesejahteraan. Contoh nyata adalah kasus RT.D yang menerima bantuan renovasi rumah karena kondisi yang sudah tidak layak dan akan runtuh, selepas rumah sudah dalam kondisi layak dan bagus ia dianggap sudah sejahtera dan tidak menerima bantuan PKH lagi. Padahal faktanya pendapatan RT.D sehari-hari tidak stabil dengan pekerjaan sebagai tukang cukur. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem tidak mampu membedakan mobilitas ekonomi mandiri dengan peningkatan status permanen.

Analisis konseptual menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan yang efektif harus memisahkan intervensi antara miskin kronis (fokus pada jaring pengaman) dan miskin transien (fokus pada pemberdayaan dan ketahanan) (Jalan & Ravallion, 1998; Santoso, 2018). Namun, temuan di Desa Sumurarum menunjukkan ketiadaan program yang membedakan secara spesifik kedua kelompok ini, yang mengindikasikan desa masih menggunakan pendekatan pengentasan kemiskinan yang belum adaptif. Kekosongan ini menjadi akar masalah struktural yang membuat miskin transien terus terperangkap dalam kerentanan. Identifikasi masalah ini secara kolektif berujung pada kesimpulan bahwa masalah miskin transien adalah masalah sistemik di tingkat tata kelola data dan kelembagaan desa. Diperlukan reformasi sistem desa, yang meliputi pembaruan data, penyusunan pedoman pemberdayaan khusus miskin transien, dan peningkatan kapasitas SDM perangkat desa.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin transien di Desa Sumurarum berada dalam keadaan jebakan kerentanan (*vulnerability trap*), yang dicirikan oleh tiga dimensi. Pertama kesejahteraan marginal dimana rumah tangga berada di atas garis kemiskinan tetapi bergantung pada upah buruh harian yang fluktuatif dan minimnya aset fisik yang layak. Kedua, kerentanan tinggi dimana terekspos risiko guncangan (kesehatan, sosial, kegagalan program) tanpa proteksi yang memadai, bahkan lebih rentan daripada miskin ekstrem yang masih mendapat bantuan sosial. Ketiga, ketidakberdayaan sistemik yang ditandai dengan kurangnya akses dan suara akibat kegagalan sistem pendataan dan ketidakadilan akses program di tingkat desa. Masalah penyebab kemiskinan transien di Desa Sumurarum terdiri dari keterbatasan sumber daya manusia (pendidikan rendah dan pekerjaan informal, ketidaktepatan intervensi program (bansos yang hanya memberi rasa aman, bukan peningkatan kesejahteraan). Termasuk inefisiensi kelembagaan desa (asimetri informasi dan kekosongan program pemberdayaan spesifik). Temuan ini secara sosiologis menekankan perlunya pergeseran paradigma kebijakan dari fokus pada bantuan (*safety net*) menjadi fokus pada ketahanan dan penguatan daya tawar (*resilience and bargaining power*) bagi kelompok miskin transien.

Referensi

- Adawiyah, S. E. (2020). Kemiskinan dan faktor-faktor penyebabnya. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Service*, 1(1), 43-50. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/6336>.

- Alfitri. (2011). *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Ariansyah, D., Sagita, M., Julia, R. A. (2025). Analisis faktor penyebab ketidakmerataan penyaluran bansos kepada masyarakat miskin. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 394-404. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15482268>.
- Chambers, R. (2007). Participation and poverty. *Development*, 50, 20–25. <https://doi.org/10.1057/palgrave.development.1100382>.
- Devereux, S. (2001). Livelihood insecurity and social protection: a re-emerging issue in rural development. *Development Policy Review*, 19(4), 507-519. <https://doi.org/10.1111/1467-7679.00148>.
- Djazuli, R. A. (2024). *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat*. UMG Press.
- Filho, W. L., et al. (2022). Transient poverty in a sustainable development context. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 29(5), 415-428. <https://doi.org/10.1080/13504509.2022.2029612>.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder. Universitas Texas.
- Fukuyama, F. (2002). Social capital and development: The coming agenda. *SAIS Review*, 22, 23-37. <https://doi.org/10.1353/sais.2002.0009>.
- Gascon, M., McIntyre-Mills, J. (2018). Empowering indigenous people: voice, choice and agency in rural development planning in Mindanao. In *Balancing Individualism and Collectivism*. Springer International Publishing. Australia.
- Iswanto, R. J., Yuliasih, E., Aziz, S. A. (2021). Strategi keluar dari jebakan kemiskinan (*poverty trap*) di Indonesia. In *Proseding Seminar Nasional Informatika*, (pp. 212-218). UPN Veteran Yogyakarta.
- Jalan, J., & Ravallion, M. (1998). Transient poverty in postreform rural China. *Journal of Comparative Economics*, 26(2), 338-357. <https://doi.org/10.1006/jcec.1998.1526>.
- Khosla, S., Jena, P. R., Rahut, D. B. (2023). Can rural livelihood programs enhance capabilities and reduce vulnerability to poverty? Evidence from a tribal region of eastern India. *Economic Analysis and Policy*, 77, 85-98. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.10.018>.
- Prihatin, R. B. (2024). *Fenomena Ketergantungan Terhadap Bantuan Sosial*. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI.
- Santoso, D. (2018). *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media.
- Sumardjo, S., Firmansyah, A., Dharmawan, L. (2023). *Pemberdayaan Urban Farming Pada Masyarakat Peri-Urban sebagai Upaya Pencapaian SDGs*. IPB Press.
- Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. Bloomsbury Academic.
- Stringer, E.T. (2007). *Action Research*. SAGE Publications.

- Syata, W. (2024). Efektifitas program bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 554–559. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2486>.
- Wardana, W. W., Sari, D. W. (2020). Dynamic poverty study: Cronic and transient poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 11(9), 600-622.
- Widiastuti, A., Sukmaningrum, M. P. S., Rusgianto, I. Y F. S., & Hady, A. F. (2021). *Model Jaring Pengaman Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Airlangga University Press.